



PLACEMAKING DI KOLONG JALAN LAYANG: FENOMENA PENGGUNAAN “LOST SPACE” UNTUK TAMAN KOTA

PLACEMAKING UNDER FLYOVERS: THE PHENOMENON OF UTILIZING "LOST SPACE" FOR URBAN PARKS

Dheamyra Aysha Ihsanti^{a*}, Sugiyantoro^a

^aProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung; Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi: dheamyraa@gmail.com

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 17 Juli 2024
- Artikel diterima: 27 Desember 2024
- Tersedia Online: 31 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena placemaking yang unik di Bandung dengan fokus pada transformasi lost space di bawah Jalan Layang Pasupati menjadi area publik formal yang dikenal sebagai "Taman Film Kota Bandung". Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi proses perkembangan dan faktor-faktor pendorong placemaking di ruang yang terabaikan, yang merupakan residu dari pembangunan jalan layang di pusat Kota Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memanfaatkan wawancara semi-terstruktur dengan sembilan informan, termasuk penduduk setempat dan pejabat pemerintah, yang dipilih melalui metode snowball sampling, serta observasi lapangan. Analisis data melibatkan analisis konten dari transkrip wawancara dan perbandingan dengan temuan observasi. Studi ini mengungkapkan dua aspek kunci: lokasi placemaking yang tidak biasa dan proses kolaboratifnya. Berbeda dengan inisiatif placemaking pada umumnya yang menargetkan ruang perkotaan yang telah ditetapkan secara formal, kasus ini secara unik mengalihfungsikan area di bawah jalan layang, mengubahnya dari ruang ilegal menjadi fungsi perkotaan formal yang terintegrasi. Proses ini didorong oleh kolaborasi pemangku kepentingan, terutama upaya yang diprakarsai masyarakat untuk mengubah lokasi aktivitas ilegal menjadi ruang positif bagi keterlibatan generasi muda. Kolaborasi ini semakin intensif seiring berkurang atau berakhirnya keterlibatan pemerintah di lokasi tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang pemanfaatan ruang perkotaan yang inovatif dan placemaking yang digerakkan oleh masyarakat dalam konteks perkotaan yang sedang berkembang.

Kata kunci: Bandung, Ruang Terabaikan, Placemaking, Ruang Publik, Taman Kota

ABSTRACT

This study examines a unique placemaking phenomenon in Bandung, Indonesia, focusing on the transformation of "lost space" beneath the Pasupati Flyover into a formal public area known as "Bandung City Film Park." The research aims to identify the developmental processes and driving factors behind placemaking in this neglected space, a byproduct of elevated bridge construction in central Bandung. Employing a qualitative approach, the study utilizes semi-structured interviews with nine informants, including local residents and government officials, selected through snowball sampling, complemented by field observations. Data analysis involves content analysis of interview transcripts and comparison with observational findings. The study reveals two key aspects: the unconventional location of placemaking and its collaborative process. Unlike typical placemaking initiatives that target formally designated urban spaces, this case uniquely repurposes the area beneath a flyover, transforming it from an illegal space into an integrated, formal urban function. The process is driven by stakeholder collaboration, particularly community-initiated efforts to convert a site of illicit activities into a positive space for youth engagement. Notably, this collaboration intensifies as formal government involvement in the location diminishes or concludes. This research contributes to the understanding of innovative urban space utilization and community-driven placemaking in developing urban contexts.

Keywords: Bandung, Lost Space, Placemaking, Public Space, Urban Park

1. PENDAHULUAN

Wacana tentang ruang perkotaan, khususnya ruang publik, telah menjadi tema sentral dalam studi perkotaan selama beberapa dekade (Andersson, 2016; Gehl & Matan, 2009). Akar diskusi ini berasal dari kritik terhadap perencanaan kota modernis pada tahun 1960-an dan 1970-an, dengan tokoh seperti Jane Jacobs dan William H. Whyte menekankan pentingnya desain skala manusia dan ruang publik yang hidup (Mela, 2014).

Pergeseran perspektif ini melahirkan konsep *placemaking* dan memperdalam pemahaman tentang ruang publik. Darmawan (2005) menjelaskan ruang publik sebagai area yang melayani kepentingan masyarakat umum, mewadahi berbagai aktivitas sosial dan rekreasi. Lim (2014) menekankan sifat inklusifnya, mendefinisikannya sebagai area yang dapat diakses oleh siapa pun tanpa batasan.

Dalam konteks modern, muncul fenomena "*lost space*" atau ruang yang terabaikan. Trancik (1986) mendefinisikannya sebagai area perkotaan yang tidak terpelihara, namun menyimpan potensi besar untuk revitalisasi. Tharziansyah et al. (2021) menambahkan aspek aksesibilitas dalam definisi ini. Konsep *lost space* menjadi penting dalam upaya memanfaatkan kembali ruang-ruang terabaikan, sejalan dengan prinsip-prinsip *placemaking* dan desain perkotaan yang berpusat pada manusia.

Fenomena perubahan *lost space* menjadi sebuah ruang publik yang difungsikan oleh masyarakat adalah salah satu bentuk dari *placemaking*. *Placemaking* menggeser paradigma pada perencanaan dan perancangan kota dimana awalnya fokus utama pada bangunan dan bentuk perkotaan makro, menjadi fokus pada ruang publik dan aktivitas manusia (Courage et al., 2021). Terkadang, *placemaking* merupakan aktivitas sehari-hari yang tidak terlihat. *Placemaking* terdiri dari tindakan sehari-hari dan peristiwa selebrasi yang dilakukan sesekali. *Placemaking* adalah pendekatan yang mengedepankan dan berpusat pada komunitas untuk mereka menentukan bagaimana citra dan fungsi dari sebuah tempat (Schneekloth & Shibley, 1995). *Placemaking* disajikan sebagai proses membentuk ulang ruang untuk membuatnya lebih menarik, bermanfaat, dan menciptakan rasa tempat (Özdemir, E., & Selçuk 2023).

Placemaking dihasilkan dari berbagai konstruk (Strydom et al., 2018) yaitu konstruk fisik (Day, 1992), konstruk sosial (Samadhi, 2001), konstruk ekonomi (Shibley, 1998), dimensi psikologis (Shibley et al., 2003), manajemen lingkungan (Horvath, 2004), dan pemberdayaan (Toolis, 2017). Perubahan elemen fisik arsitektur pada suatu tempat dapat disebut *placemaking* karena makna suatu tempat dapat terbentuk dari elemen-elemen fisik tersebut (Day, 1992). *Placemaking* disebut dihasilkan dari konstruk sosial karena *placemaking* dapat dipengaruhi oleh adanya elemen-elemen sosial seperti pandangan kepercayaan atau kebudayaan yang berpengaruh pada makna suatu tempat (Samadhi, 2001). Kemudian, *Placemaking* dapat dihasilkan pula dari konstruk ekonomi karena pola dari suatu tempat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi (Shibley, 1998). *Placemaking* dihasilkan dari dimensi psikologis karena sebuah tempat dapat memiliki nilai-nilai tertentu pada setiap orang akibat adanya perasaan terikat terhadap suatu tempat (Shibley et al., 2003). Lalu, *placemaking* dihasilkan dari manajemen lingkungan karena *placemaking* sebagai alat untuk mengelola perubahan yang terjadi pada lingkungan binaan (Horvath, 2004). *Placemaking* dapat dihasilkan dari pemberdayaan karena *placemaking* sendiri merupakan cara penggunaan ruang publik untuk meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan sosial, sehingga meningkatkan peluang untuk tindakan sipil (Toolis, 2017).

Placemaking dapat terjadi secara sendirinya secara informal atau organik dan dapat terjadi akibat adanya intervensi dalam berbagai bentuk. *Placemaking* terjadi secara natural ketika sebuah komunitas membentuk identitas kolektif pada sebuah tempat (Gill, 2010). Salah satu contoh terjadinya *placemaking* secara informal atau organik di "Chocolate City" yang merupakan sebuah area di Dengfeng, Kota Guangzhou, Tiongkok. Proses *placemaking* pada kasus ini dilakukan oleh komunitas imigran afrika untuk promosi citra positif masyarakat Afrika (Castillo, 2014). Imigran afrika berdatangan ke Guangzhou untuk melanjutkan pendidikan dan berdagang. Lama-kelamaan tercipta berbagai aktivitas komunitas di area tersebut yang dianggap para imigran Afrika ini sebagai 'rumah' mereka.

Placemaking yang terjadi akibat adanya intervensi contohnya adalah yang dilakukan oleh organisasi bernama *Project for Public Places* (PPS) di Amerika Serikat. Proyek pertama yang dilakukan oleh PPS adalah

placemaking Bryant Park di Kota New York tahun 1980. Sebelum dilakukan intervensi, Bryant Park diisi dengan tindakan kriminal seperti transaksi narkoba. Akibatnya persepsi negatif timbul terhadap taman tersebut. PPS akhirnya melakukan *placemaking* dengan intervensi berupa pembukaan pintu masuk taman, pemangkasan semak- semak yang menghalangi pemandangan dalam taman dari luar, dan penambahan penerangan untuk di malam hari. Selain dari intervensi fisik, PPS juga melakukan reaktivasi taman dengan diadakannya kegiatan rutin seperti pemasangan film di malam hari.

Pembangunan Jalan Layang Pasupati menghubungkan Kawasan Jalan Dago dengan Kawasan Jalan Pasteur dan Kawasan Pintu Tol Pasteur. Berkat jalan layang ini maka tercipta koneksi baru yang memudahkan pergerakan bagi para pelancong dari arah Jakarta dan masyarakat di peri-urban area sebelah barat Kota Bandung langsung ke jantung kota bagian utara. Koneksi baru yang tercipta bermanfaat bagi Kota Bandung, tetapi terdapat dampak lain dari pembangunan jalan layang yaitu terciptanya ruang kota yang terabaikan atau *lost space* yang tepat berada di bawah Jalan Layang Pasupati.

Berdasarkan Qamaruz-Zaman (2012), sebuah *lost space* yang tercipta di perkotaan dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik. Pemanfaatan *lost space* sebagai ruang publik ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung pada masa jabatan walikota periode 2013-2018 Ridwan Kamil yaitu dengan pembangunan Taman Film yang berlokasi di kolong Jalan Layang Pasupati. *Lost space* yang kian berubah menjadi ruang publik mengubah fungsi dan citra dari kolong Jalan Layang Pasupati.

Lost space di bawah Jalan Layang Pasupati sebelumnya merupakan lokasi yang terbengkalai, kumuh, dan dikenal mengundang banyak kejahatan. Tindak kriminal yang dulu sering diadakan di lokasi ini seperti judi dan pengedaran narkoba. Masyarakat sekitar merasa kurang nyaman dan tidak aman dengan kondisi *lost space* ini di lingkungan tempat tinggal mereka. Atas kondisi tersebut, masyarakat ingin mengubah fungsi dan citra dari *lost space* ini, bahkan beberapa masyarakat berusaha untuk membersihkan ruang ini.

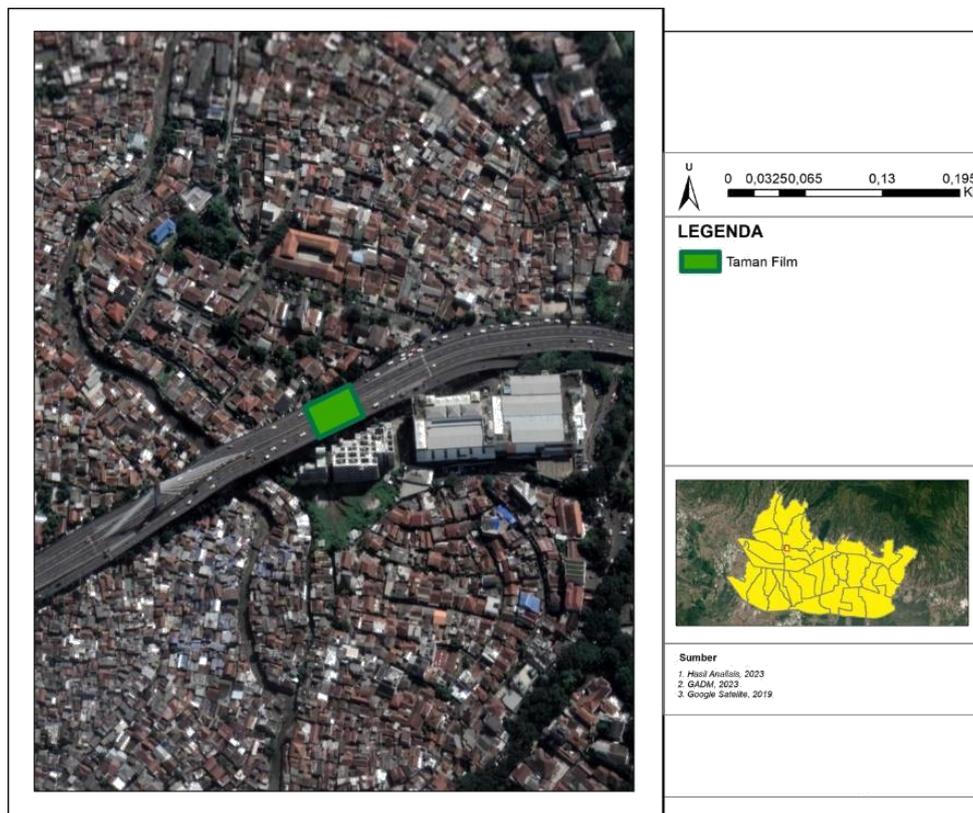
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung yang berupa program taman tematik di tahun 2013 pada masa jabatan Walikota Ridwan Kamil telah mengubah *lost space* di kolong Jalan Layang Pasupati menjadi sebuah taman bernama Taman Film. Dalam beberapa tahun sejak Taman Film dibangun hingga sekarang terjadi berbagai perubahan baik secara fisik maupun fisik. Perubahan yang terjadi adalah tingkat keramaian pengunjung, tingkat kebersihan dan keamanan, serta kualitas fisik dari taman. Perubahan ini terindikasi bahwa terjadinya *placemaking* karena adanya intervensi yang berupa kebijakan pemerintah. Dalam proses perubahan ini terdapat karakteristik pada kolong Jalan Layang Pasupati yang berubah akibat berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, dan fisik-lingkungan. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses perkembangan dan faktor-faktor pendorong di balik *placemaking* di ruang yang terabaikan ini, yang merupakan hasil sampingan dari pembangunan jembatan layang di pusat Kota Bandung. Faktor penggerak diklasifikasi sebagai positif dan negatif. Faktor penggerak positif adalah yang mendorong terjadinya *placemaking* dan faktor negatif adalah yang menghambat terjadinya *placemaking*. Faktor penggerak ini berperan untuk menciptakan yang dikenal sekarang oleh masyarakat. Saat ini, ruang ini difungsikan secara formal sebagai ruang publik, dan diberi nama Taman Film Kota Bandung.

2. DATA DAN METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa penelitian deskriptif. Menurut Gill (2010), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2007). Penelitian ini akan mendeskripsikan proses perubahan ruang di bawah Jalan Layang Pasupati yang terdiri atas rangkaian fenomena. Penelitian kualitatif dipilih karena untuk mencapai tujuan di atas dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai proses terbentuknya *placemaking*. Menurut Creswell (2022), terdapat lima jenis pendekatan dari penelitian kualitatif di mana salah satunya adalah pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi sebuah sistem terbatas (kasus) dalam

jangka waktu tertentu, melalui kompilasi data dari sumber yang berbeda-beda (observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen, dan laporan) yang mendalam dan detil (Stake, 1995). Pendekatan tersebut adalah yang digunakan pada penelitian ini.

Ruang lingkup wilayah yang menjadi objek studi ini dibatasi pada Taman Film yang terletak di bawah Jalan Layang Pasupati, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Taman ini dipilih karena karakteristik dari perkembangan *placemaking* yang unik, yaitu sebuah taman di bawah jalan layang.



Gambar 1. Lokasi Taman Film

2.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dibutuhkan untuk menggali kondisi ruang di bawah Jalan Layang Pasupati, terkhususnya Taman Film, pada periode waktu yang berbeda berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan. Sementara itu, data sekunder dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran umum dari delineasi wilayah, gambaran peristiwa pada linimasa proses *placemaking* dan penguatan konsep dari *placemaking*.

Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda dan hari yang berbeda-beda. Ketika observasi, peneliti melakukan pencatatan berupa aktivitas dan demografi dari pengunjung Taman Film. Pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dilakukan pemilihan narasumber yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Pemilihan narasumber wawancara dilakukan dengan teknik *snowballing* dengan tiga *key person* yaitu perwakilan Dinas Pertamanan Kota Bandung, Ketua Forum RW Kelurahan Tamansari, dan Karang Taruna Kelurahan Tamansari. Tujuan utama teknik ini adalah mengestimasi karakteristik yang jarang terdapat dalam populasi sehingga baru dapat diketahui dari narasumber inisial yang diambil. Dikarenakan penelitian ini terfokus pada mengkaji *timeline* dari proses *placemaking* sehingga besar kemungkinannya untuk mendapatkan responden yang baru diketahui dari

responden inisial. Tabel 1 merupakan daftar narasumber dan posisinya dalam ekosistem penelitian ini, keterangan ini yang akan menjadi referensi hasil analisis pada bagian hasil dan pembahasan.

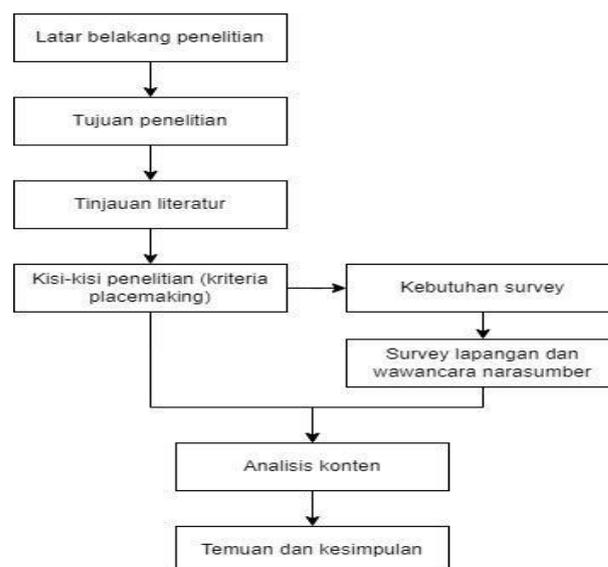
Tabel 1. Inisial Narasumber Penelitian

Inisial	Posisi/Jabatan
SR	Pengelola Taman Film
RF	Kepala Bidang Pertamanan DPKP Kota Bandung
YN	Ketua Forum RW Kelurahan Tamansari
DD	Ketua RW 09 Kelurahan Tamansari
PJ	Ketua RW 04 Kelurahan Tamansari
RD	Ketua RW 11 Kelurahan Tamansari
AG	Karang Taruna Kelurahan Tamansari
SY	Kepala Seksi Ekonomi Kec. Bandung Wetan (warga lokal)
DG	Lurah Tamansari
HR	Tokoh masyarakat Kelurahan Tamansari (warga lokal)

Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur dimanfaatkan sebagai kisi-kisi penelitian yang akan digunakan untuk analisis. Data sekunder yang dikumpulkan dan ditinjau berupa peraturan perundangan, dokumen rencana, data statistik, penelitian terdahulu terkait dengan topik (seperti buku, jurnal, artikel, dan tugas akhir). Hasil studi literatur digunakan sebagai dasar dari penelitian serta data pelengkap dalam penyusunan linimasa yang menjadi keluaran dari penelitian ini.

2.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis konten. Tahapan dari analisis konten yaitu pertama-tama hasil pengambilan data wawancara dan observasi dikonversikan menjadi bentuk teks, yaitu transkrip wawancara dan catatan observasi. Transkrip wawancara dan catatan observasi tersebut akan dilakukan pemeriksaan tulisan sebelumnya dan penghitungan frekuensi kata benda yang sering muncul untuk menemukan pola (Wilkinson & Birmingham, 2003). Lalu, pola dari kata-kata tersebut akan dikelompokkan dan diinterpretasi maknanya. Setelah makna dari data dapat diformulasikan, dilakukan perbandingan dengan kriteria placemaking dari ketiga sumber literatur.



Gambar 2. Diagram Metode Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Perkembangan Pembentukan Ruang Publik di kolong Jalan Layang Pasupati

Proses perkembangan pembentukan ruang public di kolong Jalan Layang Pasupati pada bagian Taman Film teridentifikasi periodenya dari berbagai rangkaian momen atau peristiwa yang terjadi setiap tahunnya. Momen atau peristiwa yang terjadi setiap tahunnya dikelompokkan dan dirangkum sehingga membentuk periode. Pembagian periode yang teridentifikasi adalah empat periode, yaitu periode pertama tahun 2005-2009, periode kedua tahun 2010-2014, periode ketiga tahun 2015-2019, dan periode keempat tahun 2020-2023. Setiap periode diawali dan diakhiri oleh sebuah momen atau peristiwa penting.

Periode pertama adalah periode tahun 2005-2009. Periode ini ditandai dengan resminya Jalan Layang Pasupati beroperasi pada bulan Juni 2005. Jalan Layang Pasupati dibangun diatas lahan yang telah dibebaskan, sehingga tercipta *lost space* (ruang kosong, seakan-akan tidak berpemilik) di bawah jalan layang tersebut. *Lost space* atau ruang kosong berisi bahan-bahan sisa konstruksi. Selain itu, kondisi ruang di bawah Jalan Layang Pasupati yang aman dari matahari dan hujan, serta tidak ada yang memerhatikan dijadikan kesempatan bagi tunawisma untuk menjadi tempat tinggal. Selanjutnya, pengelolaan ruang di bawah Jalan Layang minim sehingga mudah untuk dilakukan aktivitas kriminal seperti pengedaran narkoba (SR, PJ, SY, DD).

Periode kedua adalah periode tahun 2010-2014. Periode ini ditandai dengan berdirinya Balubur Town Square (Baltos) yang menjadi pusat ekonomi baru di Tamansari. Baltos yang terletak tepat di sebelah ruang di bawah Jalan Layang Pasupati (lokasi Taman Film) mengundang para pedagang kaki lima untuk berdagang di ruang di bawah Jalan Layang sebagai pendukung aktivitas Baltos. Aktivitas ekonomi mulai hidup di kolong Jalan Layang Pasupati pada periode ini. Kemudian pada tahun 2013, mantan Walikota Ridwan Kamil berkampanye untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat dengan menciptakan dan merevitalisasi ruang publik. Program Taman Tematik dilaksanakan oleh tim mantan Walikota Ridwan Kamil, salah satunya adalah pembangunan Taman Film di bawah Jalan Layang Pasupati pada September 2014 (YN, PJ, RF, SY).



Sumber: Merdeka Bandung, 2016

Gambar 3. Suasana penggunaan kolong Jalan Layang Pasupati sebelum adanya Taman Film pada periode kedua 2010-2014



Sumber: tourbandung.id, 2019

Gambar 4. Peresmian Taman Film pada akhir periode kedua 2010-2014

Periode ketiga adalah periode tahun 2015-2019. Periode ini ditandai dengan beroperasinya Taman Film dengan kegiatan sehari-hari. Rangkaian kegiatan nonton bersama yang diadakan oleh pemerintah sering dilakukan seperti peringatan Konferensi Asia Afrika, dan yang paling penting pertandingan Persib. Pada tahun 2016, Taman Film dimanfaatkan secara rutin oleh berbagai komunitas untuk pagelaran seni, berkumpul, tempat anak bermain, pelatihan taekwondo dan silat, serta rapat warga. Sayangnya di akhir tahun 2019, terutama di Desember 2019 terjadi konflik rumah deret Tamansari yang terletak persis di sebelah Taman Film. Kerusakan konflik ini berpengaruh pada aktivitas Taman Film yang menjadi lebih sepi dan dijadikan tempat berlindung peserta konflik (DD, PJ, RD, RF, AG, DG, YN, HR).

Periode terakhir adalah periode tahun 2020 hingga 2023. Periode ini ditandai dengan mewabahnya virus COVID-19 di seluruh dunia yang menyebabkan seluruh ruang publik harus ditutup. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 juga berlaku di Kota Bandung, termasuk di Taman Film, sehingga Taman Film ditutup dan dijaga oleh petugas. Kemudian, fasilitas utama dari Taman Film, yaitu *layer* videotron, rusak akibat burung-burung liar yang bersarang ketika tidak ada penggunaan layar videotron. Lalu, pandemi COVID-19 mulai pulih di kuartal terakhir 2021 sehingga mengembalikan pula aktivitas di Taman Film. Aktivitas sehari-hari seperti makan bersama, berkumpul, dan bermain mulai dilaksanakan. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap serta mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan PPKM yang berlaku (PJ, RF, AG, DG).

Tabel 2. Periode Proses Perkembangan Pembentukan Ruang Publik di Bawah Jalan Layang Pasupati

	Periode <i>Lost Space</i> (2005-2009)	Periode Mulainya Aktivitas Ekonomi (2010-2014)	Periode Awal Taman Film (2015-2019)	Periode Pasca Pandemic (2020-2023)
Aktivitas siang	Ruang kosong berisi sisa konstruksi	Berdirinya Baltos mendorong masyarakat untuk berdagang di sekitarnya	Taman Film dibuka dan sering digunakan untuk aktivitas nonton bersama	Tidak ada aktivitas karena PPKM. Setelah tidak ada PPKM, aktivitas sehari-hari seperti anak-anak bermain, botram, dan berkumpul
Aktivitas malam	Aktivitas kriminal seperti transaksi narkoba, pengaduan hewan, minum-minuman beralkohol dibawah umur, tempat tinggal tunawisma	Masih sering diisi oleh aktivitas kriminal	-	Tempat remaja minum-minuman beralkohol
Persepsi masyarakat	Persepsi masyarakat negatif dan masyarakat	Menjadi tempat untuk berbelanja bagi masyarakat Tamansari	Taman Film terkenal sebagai tempat nonton pertandingan Persib	Masyarakat menganggap Taman Film sebagai tempat berkumpul
Tindakan kolektif masyarakat		Masyarakat mulai membenahi bedeng-bedeng bekas konstruksi	Pendukung Persib sering merusak fasilitas setelah pertandingan	Tidak semua masyarakat menjaga kebersihan, kebanyakan meninggalkan sampah dan menggunakan Sepatu.

3.2. Perubahan Kondisi Ruang Taman Film berdasarkan kriteria *Placemaking*

Dari berbagai proyek yang telah dilakukan, diformulasikan kerangka konsep yang disebut *place diagram* oleh PPS sebagai acuan dari pelaksanaan *placemaking* yang berisi kriteria-kriteria ruang publik ideal. Kriteria yang terdapat pada *place diagram* adalah *sociability*, *uses and activities*, *comfort and image*, dan *aksesibilitas* (Project for Public Spaces, 2004). Kriteria tersebut memiliki beberapa komponen yang dapat dilihat pada Gambar 5.



Sumber: Project for Public Places, 2004

Gambar 5. Place Diagram oleh Project for Public Places

Selain dari *Project for Public Places*, kriteria *placemaking* lainnya juga dikeluarkan oleh ahli lainnya seperti Village Well dan Mateo-Babiano dan Lee. *Placemaking* merupakan pendekatan yang holistik, multi-disiplin, dalam merencanakan dan mengembangkan tempat yang termasuk mengerti kebudayaan lokal (Village Well, 2021), kebijaksanaan, dan kualitas dari komunitas setempat dan lingkungan, serta memastikan adanya kolaborasi (Village Well, 2021). Pendekatan *placemaking* berdasarkan Village Well (2021) dituangkan pada framework 5P yaitu *people*, *product*, *program*, *physical environment*, dan *planet*. Menurut Mateo-Babiano & Lee (2020), *Placemaking* merupakan proses membentuk, mengalami, dan berkontribusi pada suatu 'tempat' secara kontinyu. Masyarakat merupakan inti dari *placemaking*, dilakukan baik dengan cara diterapkannya proses partisipatif dalam rancangan ruang publik untuk pendalaman pengertian persepsi dan aspirasi masyarakat, ataupun dengan respon proyek atau program yang menciptakan hubungan positif dengan 'tempat' (Mateo-Babiano & Lee, 2020). Mateo-Babiano & Lee (2020) mengemukakan sebuah framework untuk *placemaking* yang disebut '5P: A Place Agency Placemaking Framework'. 5P pada framework ini merupakan lima elemen dari *placemaking* yaitu *people* (masyarakat), proses, produk, program, dan *place evaluation* (evaluasi tempat). Dari ketiga sumber kriteria *placemaking*, kriteria tersebut disintesis dan menjadi acuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Kisi-kisi Penelitian Kriteria *Placemaking*

Kriteria	Inti/Makna tiap Kriteria
Sosiabilitas	Suatu tempat dapat disebut ideal ketika masyarakat nyaman untuk berinteraksi dan timbul rasa kepemilikan terhadap tempat tersebut. Rasa nyaman untuk berinteraksi dan kepemilikan tersebut dapat terjadi ketika masyarakat sudah memiliki tujuan yang sama untuk secara kolektif berpartisipasi dalam membenahi tempat tersebut.
<i>Uses and activities</i>	Tempat yang ideal adalah tempat yang tersedia berbagai fungsi aktivitas. Keragaman fungsi dan aktivitas tersebut dilihat baik pada siang hari, maupun pada malam hari. Fungsi dan aktivitas dapat berupa acara sehari-hari ataupun acara selebrasi.
<i>Comfort & Image</i>	Tempat yang ideal adalah tempat yang dapat timbul rasa nyaman dan citra yang positif. Komponen ini meninjau pengalaman masyarakat dan terbentuknya cerita atau sebuah <i>image</i> dari suatu tempat. Selain itu, komponen ini meninjau keberadaan praktik-praktik keberlanjutan pada tempat.
Aksesibilitas	Tempat yang memiliki akses yang baik serta terkoneksi dengan lingkungan di sekitarnya. Pada komponen ini juga ditinjau kondisi lingkungan binaan dari tempat studi dan sekitarnya.
Process	Ruang publik ideal yang dicapai dengan <i>placemaking</i> utamanya muncul dari proses <i>bottom-up</i> , berbasis aset, dan <i>purpose-driven</i> (berdasar atas tujuan) yang menginformasikan prinsip dan kebijakan <i>top-down</i> .
<i>Place Evaluation</i>	Melihat nilai-nilai dari ruang publik masih terjaga atau tidak.

Berdasarkan data di lapangan untuk kriteria sosiabilitas, terdapat perubahan yang naik turun akibat tindakan kolektif yang dilakukan masyarakat dalam pembenahan ruang dan kenyamanan masyarakat untuk berinteraksi di Taman Film. Pada tahun 2006, ruang di bawah Jalan Layang Pasupati yang merupakan *lost space* menjadi tempat untuk aktivitas yang cenderung negatif dan meresahkan warga sehingga masyarakat tidak nyaman untuk berinteraksi di ruang tersebut. Warga sekitar merasa resah dengan adanya aktivitas negatif seperti pengedaran narkoba, pengaduan hewan, dan tempat tinggal tunawisma. Lalu, keresahan warga tersebut membentuk tujuan bersama untuk pembenahan ruang di bawah Jalan Layang. Akhirnya, dilakukan pembenahan oleh beberapa warga sekitar yang peduli akan tempat tersebut. Kemudian pada bulan September 2014, diresmikan Taman Film, masyarakat jadi memiliki ruang publik baru yang nyaman untuk berinteraksi. Terutama di Kelurahan Tamansari yang padat dan kumuh, dibutuhkan ruang yang nyaman untuk berinteraksi. Sekarang, sebagian dari warga sekitar, terutama anak-anak, sudah menjadikan Taman Film sebagai tempat favorit untuk bermain.

Pada kriteria *uses and activities* terdapat perubahan fluktuatif yang dapat dilihat dari jenis aktivitas yang positif dan negatif. Selain itu, dapat dilihat juga dari sisi tingkat keramaian pengunjung, baik pada aktivitas sehari-hari maupun aktivitas eventual. Pada awal resminya Jalan Layang Pasupati, ruang di bawah jalan layang tidak ada aktivitas. Akibat kekosongan aktivitas dan pengelolaan, kolong Jalan Layang Pasupati dijadikan tempat oleh beberapa pihak untuk melakukan aktivitas negatif seperti pengedaran narkoba, pengaduan hewan, dan tempat tinggal tunawisma di malam hari. Lalu, ketika diresmikannya Taman Film pada tahun 2014, terciptalah ruang publik yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berkumpul, bermain, makan bersama, dan lain sebagainya. Aktivitas utama yang juga paling mengundang keramaian adalah nonton bersama Persib. Kemudian ketika masa pandemi menghadang, sempat tidak ada aktivitas. Namun, setelah mulai pulih aktivitas sehari-hari yang beragam sudah kembali. Hanya saja, aktivitas nonton bersama sudah tidak dapat dilakukan. Selain aktivitas harian, acara selebrasi juga sering dilaksanakan di Taman Film seperti syukuran pelantikan polisi, serah terima jabatan, dan wisuda TK. Sayangnya, malam hari masih ditemukan aktivitas negatif seperti mabuk-mabukkan.

Pada kriteria *comfort and image*, terjadi perubahan yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah adanya Taman Film. Saat Jalan Layang Pasupati baru saja terbangun, ruang di bawah Jalan Layang Pasupati diisi aktivitas yang mengganggu masyarakat sehingga citra terhadap ruang di bawah jalan layang negatif

yaitu kumuh dan menakutkan. Adanya Baltos mengubah citra pada ruang di bawah Jalan Layang Pasupati sebagai pusat aktivitas ekonomi, seperti jual-beli bahan makanan. Taman Film resmi digunakan oleh warga pada September 2014, *image* dari Taman Film adalah ikon dari Tamansari dan sebagai tempat *center of activity*. Kegiatan nonton bersama pertandingan Persib yang sering dilakukan di Taman Film membuat citra Taman Film sebagai ‘tempat nonton bersama Persib.’ Setelah rusaknya *layer* videotron, aktivitas yang dapat dilakukan adalah aktivitas sehari-hari saja sehingga citra ‘tempat nonton bersama’ hilang. Sekarang, citra Taman Film adalah sebagai ‘tempat berkumpul’.

Pada kriteria aksesibilitas, tidak terlalu banyak terjadi perubahan dengan pembangunan ruang publik di kolong Jalan Layang Pasupati. Bersamaan dengan dibangunnya Jalan Layang Pasupati di tahun 2005, dibangun jalan baru. Jalan baru ini merupakan akses menuju ruang di bawah Jalan Layang Pasupati, termasuk Taman Film. Jalan umum yang semula ada seakan-akan menjadi milik Baltos karena berada tepat di antara Gedung Baltos. Akses menuju ruang di bawah Jalan Layang Pasupati adalah kedua jalur yang disebutkan sebelumnya. Akses jalan dari sebelum adanya Taman Film hingga adanya Taman Film tidak ada perubahan. Selain itu, akses transportasi publik tidak ada yang terkoneksi langsung dengan ruang di bawah Jalan Layang Pasupati. Lalu, Taman Film dapat dijangkau oleh pejalan kaki yang bertempat tinggal dekat dengan Taman. Selanjutnya, lapangan parkir yang tersedia sebagiannya diambil oleh pihak travel.

Kriteria berikutnya yang akan ditinjau adalah proses. Untuk mencapai ruang publik yang baik, diperlukan perencanaan *bottom-up*, berbasis aset, dan berdasarkan tujuan (Village Well, 2021). Proses ini dapat dilihat dari peran setiap pemangku kepentingan. Peran dari setiap pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori internal, primer, dan sekunder. Kategori Internal adalah kategori dimana pemangku kepentingan kewenangan penuh terhadap Taman Film seperti memiliki dan mengelola Taman Film secara rutin. Kategori Primer adalah kategori dimana pemangku kepentingan memiliki kepentingan secara langsung terhadap Taman Film seperti menggunakan, mengelola, memberikan bantuan keuangan, dan menjaga ketertiban Taman Film. Terakhir, kategori sekunder adalah kategori dimana pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap Taman Film seperti kepemilikan wilayah di sekitar Taman Film.

Perencanaan Taman Film ketika akan dibangun kurang melibatkan masyarakat. Para ketua RW di Kelurahan Tamansari menyatakan bahwa masyarakat seakan-akan ‘terima jadi’ dari proyek pemerintah. Meskipun begitu, masyarakat tetap menerima pembangunan Taman Film secara positif. Kemudian, untuk pengelolaannya, dilakukan oleh 2 orang warga yang ditunjuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung sebagai pegawai lepasan harian (PLH). Lalu, pembiayaan dari pembangunan dan pengelolaan tiga tahun pertama bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Multistrada (ban Achilles). Pada tahun-tahun berikutnya, pembiayaan dilakukan oleh DPKP Kota Bandung.

Kriteria terakhir adalah *place evaluation*. Nilai ruang publik sebagai ruang yang dapat diakses siapa saja masih berlaku. Fasilitas utama seperti toilet dan musholla sudah tidak berfungsi sehingga masyarakat merasa tidak nyaman untuk berkunjung ke Taman Film. Daya tarik utama Taman Film, yaitu *layer* videotron, sudah tidak berfungsi sehingga masyarakat berkurang ketertarikannya untuk berkunjung ke Taman Film. Kebersihan Taman Film kurang dijaga oleh pengunjung, masih sering ditemukan banyak sampah sisa makanan. Keamanan di malam hari kurang karena masih sering ditemukan botol bekas minuman beralkohol, jarum suntik, dan sampah rokok.

3.3. Karakteristik dari Setiap Periode pada Proses *Placemaking* di Kolong Jalan Layang Pasupati

Sebagaimana yang telah disebutkan kedua bagian sebelum ini, karakteristik dari setiap periode memiliki kondisi ruang yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik pada setiap periode ditandai dengan terdapat momen atau peristiwa penting yang berpengaruh pada proses *placemaking* di kolong Jalan Layang Pasupati. Karakteristik setiap periode dan momen yang membatasinya dijabarkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik tiap Periode *Placemaking*

Periode	Karakteristik	Momen/ Peristiwa Penting di Awal	Momen/ Peristiwa Penting di Akhir	Bentuk <i>Placemaking</i>	Alasan ditetapkan sebagai <i>placemaking</i>	Penyebab perubahan karakteristik
2005-2009	Ruang seakan tidak berpemilik, tidak ada yang memperhatikan, dan kumuh. Aktivasnya diisi oleh kegiatan negatif.	Resmi beroperasinya Jalan Layang Pasupati	Pembenahan secara kolektif oleh masyarakat	Tidak terjadi	Aktivitas dan citra yang negatif pada ruang di bawah Jalan Layang Pasupati.	Sebagian dari masyarakat sudah memiliki rasa kepemilikan terhadap ruang di bawah Jalan Layang Pasupati untuk dibenahi sehingga warga sekitar merasa lebih aman dan nyaman.
2010-2014	Ruang sudah mulai hidup dengan beragam aktivitas ekonomi.	Baltos sebagai pusat perbelanjaan Tamansari	Dibangunnya Taman Film	Ada pengaruh dari kebijakan pemerintah	Pandangan masyarakat terhadap ruang di bawah Jalan Layang Pasupati sudah mulai positif dan ruang diisi oleh aktivitas masyarakat secara natural.	Terdapat perubahan fisik yang signifikan sehingga tingkat keamanan, kenyamanan, dan citra positif juga berubah secara signifikan.
2015-2019	Terbangun ruang publik yang aman dan nyaman, dapat digunakan oleh siapa saja, dan diadakan beragam aktivitas.	Operasional rutin Taman Film	Konflik rumah deret Tamansari	Natural	Masyarakat secara natural menggunakan Taman Film untuk berkumpul dan melakukan beragam aktivitas, serta membentuk citra yang baik bagi tempat tersebut.	Kondisi lingkungan yang tidak aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas di Taman Film.
2020-sekarang	Taman menjadi sepi karena kondisi pandemi, lama-kelamaan mulai muncul kembali beragam aktivitas.	Pandemi COVID-19	-	Natural	Masyarakat secara natural kembali menggunakan Taman Film untuk beraktivitas ketika pandemi COVID-19 mulai pulih.	-

3.4. Faktor Penggerak dalam Proses *Placemaking* di Kolong Jalan Layang Pasupati

Pada bagian-bagian sebelumnya, telah ditunjukkan proses *placemaking* yang terjadi di kolong Jalan Layang Pasupati berdasarkan kriteria *placemaking*. Pada setiap periodenya, terdapat faktor penggerak atau *interceptor* yang mengubah proses *placemaking*. Penggerak tersebut dapat bersifat positif dan negatif terhadap proses *placemaking* yang terjadi. Penggerak positif adalah tindakan atau peristiwa yang memicu terjadinya *placemaking* pada ruang di kolong Jalan Layang Pasupati. Di sisi lain, penggerak negatif atau penghambat adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat terjadinya *placemaking* pada ruang di kolong Jalan Layang Pasupati. Faktor penggerak positif dan negatif dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6t.

Tabel 5. Faktor Penggerak dalam Proses *Placemaking* di Kolong Jalan Layang Pasupati

Periode	Jenis Penggerak		
	Ekonomi	Sosial	Fisik & Lingkungan
2005-2009	-	-	1. Pembenahan sisa konstruksi secara kolektif oleh masyarakat.
2010-2014	-	-	1. Pembangunan Taman Film
2015-2019	1. Penggunaan tidak berbayar 2. CSR perusahaan	1. Kegiatan nonton bersama 2. Kegiatan komunitas film 3. Kegiatan mahasiswa	-
2020-sekarang	1. Penggunaan tidak berbayar	1. Latihan rutin perguruan taekwondo 2. Kegiatan kampus/mahasiswa 3. Rapat warga kewilayahan dan forum RW	1. Kebijakan PPKM yang mereda

Tabel 6. Faktor Penghambat Terjadi *Placemaking* di Kolong Jalan Layang Pasupati

Periode	Jenis Penghambat		
	Ekonomi	Sosial	Fisik & Lingkungan
2005-2009	1. Transaksi narkoba	1. Pengaduan hewan 2. Tempat remaja mabuk minuman beralkohol 3. Tempat tinggal tunawisma 4. Perang <i>geng</i>	1. Gundukan sisa konstruksi
2010-2014	1. Preman keamanan Baltos 2. Transaksi narkoba	1. Perencanaan tidak melibatkan warga 2. Pengaduan hewan 3. Tempat tinggal tunawisma 4. Perang <i>geng</i>	1. Jalan umum digunakan oleh Baltos 2. Parkir warga
2015-2019	1. Pedagang kaki lima 2. Preman parkir	1. Kerusuhan pendukung Persib 2. Konflik rumah deret Tamansari	1. Akses alat berat pembangunan rumah deret Tamansari
2020-sekarang	1. Pedagang kaki lima 2. Preman parkir 3. Sudah tidak ada CSR	1. Pelecehan secara verbal di sekitar Taman Film 2. Penjagaan taman hanya sampai pukul 17.00	1. PPKM saat Pandemi COVID-19 2. Lokasi bank sampah berdekatan 3. Lapangan futsal sebelah Taman Film rusak 4. Fasilitas umum rusak seperti toilet, rak sepatu, dan tempat sampah 5. Layar videotron rusak 6. Parkir Taman Film dikuasai oleh bisnis <i>travel</i>

4. KESIMPULAN

Terdapat beberapa temuan yang didapat dari analisis dan pembahasan diatas, pertama, proses terjadinya *placemaking* di kolong Jalan Layang Pasupati adalah fenomena pemanfaatan ruang yang terabaikan (*lost space*) menjadi sarana ruang publik. Ruang ini yang semula merupakan ruang kosong yang digunakan secara informal oleh masyarakat, terutama aktivitas negatif, sehingga sulit disebut sebagai *placemaking*. Lalu, dengan adanya intervensi pemerintah berupa kebijakan, ruang di kolong Jalan Layang Pasupati ditetapkan pembangunan infrastruktur kota atau ruang publik formal. Kedua, sebelum ditetapkan sebagai taman kota, telah dilakukan pembenahan oleh beberapa masyarakat yang peduli sehingga terindikasi bahwa terjadi *placemaking* secara informal. Selanjutnya, proses penetapan lokasi kolong Jalan Layang Pasupati sebagai taman kota dan bagian dari ruang publik Kota Bandung merupakan bentuk dari formal *placemaking* atau *placemaking* yang terjadi *by design*. Pelibatan masyarakat pada proses *placemaking* ini minim, baik dalam tahapan penetapan kebijakan, perencanaan, pembangunan, maupun pengelolannya. Ketiga, karakteristik ruang yang terbentuk di tempat ini disebabkan oleh adanya momentum atau peristiwa penting yang berpengaruh pada proses *placemaking*. Hal ini menghasilkan periodisasi pentahapan perkembangan *placemaking*. Keempat, terdapat faktor penggerak dan penghambat dari terjadinya *placemaking* di kolong Jalan Layang Pasupati. Faktor-faktor tersebut berbeda-beda pada setiap periodenya. Faktor penggerak positif adalah tindakan atau peristiwa yang memicu terjadinya *placemaking*, seperti berkembangnya kegiatan nonton bersama, diskusi komunitas film, latihan bela diri, dan lain-lain. Faktor penghambat adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat terjadinya *placemaking*, atau disebut juga sebagai faktor penghambat, seperti berkembangnya transaksi narkoba, sebagai tempat adu hewan, sebagai tempat tinggal para tunawisma dan lain- lain.

Fenomena penggunaan ruang terabaikan (*lost space*) di kolong Jalan Layang Pasupati menjadi taman kota merupakan salah satu opsi untuk pemanfaatan ruang kota terabaikan yang sering terjadi di perkotaan. Ruang terabaikan (*lost space*) akibat pembangunan infrastruktur kota yang masif sebaiknya dimanfaatkan untuk ruang publik agar lebih banyak masyarakat yang terdampak positif. Selanjutnya, pembangunan ruang publik sebaiknya melibatkan masyarakat sekitar karena ketika terjadi sesuatu di ruang publik mereka yang paling pertama dapat menanggapi kejadian tersebut. Dengan adanya pelibatan masyarakat, mereka akan memiliki rasa kepemilikan untuk sama-sama menjaga ruang publik. Selain itu, Jalan Layang Pasupati merupakan aset pemerintah pusat sehingga ruang di kolong jalan layang tersebut juga milik pemerintah pusat. Ruang pada kolong Jalan Layang Pasupati mengalami kekosongan pengelolaan karena lambatnya proses pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Temuan baru penelitian ini terletak pada lokasi dan proses terjadinya *placemaking*. Lokasi terjadinya *placemaking* ada di tempat yang tidak umum, yaitu lokasi kolong jalan layang yang seharusnya dilarang untuk kegiatan formal. Umumnya *placemaking* terjadi atau diarahkan pada lokasi yang mempunyai fungsi ruang lahan yang ditetapkan secara formal untuk fungsi-fungsi ruang lahan dalam arah tujuan pembangunan kota. Namun pada kasus studi ini ada keunikan yaitu pemanfaatan kolong jalan layang sebagai ruang yang semula ilegal tetapi iintegrasikan sebagai bagian ruang formal untuk fungsi-fungsi ruang kota.

Prosesnya terjadi karena adanya kolaborasi dari semua pemangku kepentingan khususnya inisiasi dari masyarakat untuk mengubah lokasi yang tadinya untuk banyak kegiatan ilegal menjadi lokasi untuk kegiatan positif bagi generasi muda. Kolaborasi ini justru sangat kuat ketika kehadiran pemerintah yang mempunyai program formal di lokasi ini sudah berkurang atau selesai.

Penelitian ini memiliki batasan seperti lokasi kolong Jalan Layang Pasupati difokuskan pada Taman Film. Lalu, pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh berpengaruh sehingga belum menjangkau masyarakat luas. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah pembuatan konsep rancangan berdasarkan konsep *placemaking* yang cocok untuk di Taman Film. Selain itu, dapat dilakukan penelitian yang lebih luas mengenai proses *placemaking* pada ruang publik di kolong Jalan Layang Pasupati lainnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk penelitian ini seperti para narasumber. Penelitian ini merupakan penelitian mandiri yang dikerjakan sebagai bagian proyek penelitian Tugas Akhir di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung. Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulis dan tidak merepresentasikan pandangan ITB.

6. REFERENSI

- Andersson, C. (2016). Public Space and the New Urban Agenda. *The Journal of Public Space*, 1(1), 5–10. <https://doi.org/10.5204/jps.v1i1.4>.
- Castillo, R. (2014). Feeling At Home In The “Chocolate City”: An Exploration Of Place-Making Practices And Structures Of Belonging Amongst Africans In Guangzhou. *Inter-Asia Cultural Studies*, 15(2), 235–257. <https://doi.org/10.1080/14649373.2014.911513>
- Courage, C., Borrup, T., Jackson, M. R., Legge, K., McKeown, A., Platt, L., & Schupbach, J. (Eds.). (2021). *The Routledge handbook of placemaking*. London: Routledge.
- Creswell, J. W. (2022). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications Inc.
- Darmawan, E. (2005). Ruang Publik dan Kualitas Ruang Kota. Seminar Nasional PESAT 2005. Jakarta.
- Day, L. L. (1992). Placemaking by Design: Fitting a Large New Building into a Historic District. *Environment and Behavior*, 24(3), 326–346.
- Gehl, J., & Matan, A. (2009). Two Perspectives on Public Spaces. *Building Research & Information*, 37 (1), 106-109. <https://doi.org/10.1080/09613210802519293>.
- Gill, N. (2010). Pathologies of Migrant Place-Making: The Case of Polish Migrants to the UK. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 42(5), 1157–1173. <https://doi.org/10.1068/a42219>.
- Horvath, R. J. (2004). The Particularity of Global Places: Placemaking Practices in Los Angeles and Sydney. *Urban Geography*, 25(2), 92–119. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.25.2.92>.
- Lim, W., & Leon Van Shaik. (2014). *Public space in urban Asia*. World Scientific Publishing, Cop.
- Mateo-Babiano, I., & Lee, G. (2020). People in Place: Placemaking Fundamentals. In *Placemaking Fundamentals for the Built Environment*. Springer Singapore.
- Mela, A. (2014). Urban Public Space between Fragmentation, Control and Conflict. *City Territory and Architecture*, 1 (1), 1-7. <https://doi.org/10.1186/s40410-014-0015-0>.
- Özdemir, E., & Selçuk, İ. Ş. (2023). Place to Space, Space to Place: A Theoretical Discussion on Place-Making in Lost Spaces. *Turkish Journal of Sense of Place and Urban Studies*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11091089>.
- Project for Public Spaces. (2004, Oct 31). What If We Built Our Cities Around Places? Retrieved from <https://www.pps.org/article/greatcitiesinitiative> 16 Agustus 2023
- Qamaruz-Zaman, N., Samadi, Z., & Azhari, N. F. N. (2012). Opportunity in Leftover Spaces: Activities under the Flyovers of Kuala Lumpur. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 68, 451–463. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.241>
- Samadhi, T. N. (2001). The Urban Design of a Balinese Town: Placemaking Issues in the Balinese Urban Setting. *Habitat International*, 25(4), 559-575. [https://doi.org/10.1016/S0197-3975\(01\)00024-8](https://doi.org/10.1016/S0197-3975(01)00024-8).
- Schneekloth, L. H., & Shibley, R. G. (1995). *Placemaking: The Art and Practice of Building Communities*. Wiley.
- Shibley, R. G. (1998). The Complete New Urbanism and the Partial Practices of Placemaking. *Utopian Studies*, 9(1), 80–102.
- Shibley, R. G., Schneekloth, L. H., & Hovey, B. (2003). Constituting the Public Realm of a Region: Placemaking in the Bi-National Niagaras. *Journal of Architectural Education*, 57(1), 28–42.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Sage Publications Inc.
- Strydom, W., Puren, K., & Drewes, E. (2018). Exploring Theoretical Trends in Placemaking: Towards new Perspectives in Spatial Planning. *Journal of Place Management and Development*, 11(2), 165–180. <https://doi.org/10.1108/JPM-11-2017-0113>.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Rosdakarya.
- Tharziansyah, M., Sarbini, G. N., & Nurfansyah, N. (2021, May). Lost space as an inhibiting factor for city sustainability. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 780, No. 1, p. 012023). IOP Publishing. DOI: 10.1088/1755-1315/780/1/012023.

- Toolis, E. E. (2017). Theorizing Critical Placemaking as a Tool for Reclaiming Public Space. *American Journal of Community Psychology*, 59(1–2), 184–199. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12118>.
- Trancik, R. (1986). *Finding Lost space: Theories of Urban Design*. Van Nostrand Reinhold.
- VillageWell. (2021, March 18). The New Local Place Activation Toolkit by Village Well. Retrieved from https://issuu.com/villagewell/docs/village_well_activation_kit_210317.
- Wilkinson, D., & Birmingham, P. (2003). *Using Research Instruments: A Guide for Researchers*. RoutledgeFalmer.